

HLM TPIP: Pemerintah Dorong Penguatan Pengendalian Inflasi serta Siapkan Stimulus HBKN Ramadan dan Idulfitri



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.02.04/26/SET.M.EKON.3/01/2026

HLM TPIP: Pemerintah Dorong Penguatan Pengendalian Inflasi serta Siapkan Stimulus HBKN Ramadan dan Idulfitri

Jakarta, 30 Januari 2026

Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2026. Kesepakatan ini dicapai dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada Kamis (29/01), sebagai komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian Asta Cita.

“Terkait *volatile food*, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen. Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara Daerah dan Pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui peningkatan produktivitas dan pembiayaan, meningkatkan kelancaran logistik untuk beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan juga tentu yang penting mengenai beras,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin HLM TPIP.

Selain itu, dalam koordinasi antara Daerah dan Pusat, Pemerintah mendorong perumusan kebijakan *administered prices* yang mempertimbangkan *timing*, *sequencing*, dan *magnitude* untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta memperkuat sinergi kebijakan dan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa inflasi 2026 berpotensi menghadapi tekanan pada Q1-2026 yang disebabkan oleh ketidakpastian global (*imported inflation*), iklim dan faktor cuaca, serta pola musiman HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk itu, Pemerintah menyiapkan stimulus berupa pemberian diskon transportasi dan diskon tarif tol, serta pemberian bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada pada desil 1 s.d. 4, di bulan Februari dan Maret 2026.

“Pemerintah juga terus mendorong di daerah bencana untuk dukungan infrastruktur dan logistik agar kita bisa menjaga, dan tadi disampaikan bahwa di daerah tersebut inflasi sudah mulai turun. Kemudian untuk menjelang Hari Raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun minyak kita sedang siapkan juga,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers usai HLM TPIP.

Dalam kaitan ini, upaya ditempuh dengan implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan

Sejahtera, yang merupakan penguatan dari program GNPIP. Untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi, TPIP berencana melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 pada akhir Juni 2026 dengan tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi”.

Dengan pencapaian inflasi tahun 2025 yang sebesar 2,92% (yoy) dan terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$, hal ini menunjukkan keberhasilan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi sesuai dengan sasaran.

Turut hadir dalam kesempatan ini diantaranya yaitu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga anggota TPIP. (dlt/fsr)

**Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, Threads, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia